

PENGUKURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Rina Trisnawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

email: rina.trisnawati@ums.ac.id

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure research conducted in Islamic bank mostly used Islamic Social Reporting (ISR) index. Finding of the research indicates that score of CSR disclosure in Islamic bank is very low (30%-40%). Accordingly, this research is designed developing new measurement based on ISR index and Global Reporting Initiative (GRI) index. The sample used in the study are 5 Islamic banks listed in Indonesian Stock Exchange which have annual report and other CSR reporting based on their website during 2009-2011 periods. Content analysis and decomposition analysis are used as data analysis. The results showed that convergence of GRI index and ISR index should be done on certain indicators such as employment, governance, economics, and product-services responsibility. The decomposition analysis showed that the new measurement have 90 items with 10 indicators. Hopefully, these results have contribution for CSR disclosure, especially in Islamic banks in Indonesia.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, GRI, ISR, disclosure*

Abstrak

Sebagian besar penelitian mengenai pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilakukan pada perbankan syariah menggunakan indeks Islamic Social Reporting (ISR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor pengungkapan CSR perbankan syariah menggunakan indeks tersebut hasilnya rendah (30%-40%). Maka penelitian ini didesain untuk melakukan pengukuran CSR yang baru dengan melakukan konvergensi GRI (121 item) dan ISR (72 item). Sampel penelitian adalah 5 bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Unit analisisnya adalah laporan keuangan bank syariah dan publikasi CSR periode 2009-2011. Analisis data menggunakan *content analysis* dan *decomposition analysis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa konvergensi indeks GRI dan indeks ISR harus dilakukan untuk indikator-indikator seperti tenaga kerja, pemerintah, ekonomi dan tanggung jawab terhadap produk dan jasa. Pengukuran CSR yang baru menghasilkan 90 item pengukuran dengan 10 indikator. Diharapkan hasil ini memberikan kontribusi signifikan pada pengungkapan CSR khususnya untuk industri perbankan di Indonesia.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility (CSR), GRI, ISR, pengungkapan*

PENDAHULUAN

Tanggungjawab sosial atau sering disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR) merupakan wacana yang makin umum dalam dunia bisnis di Indonesia. Kesadaran mengenai CSR ini terlihat dari makin banyaknya perusahaan yang mengungkapkan isu CSR dalam laporan keuangan tahunan maupun *press release* lain

nya. Pemerintah pun mengakomodirnya melalui peraturan mengenai pengungkapan mengenai praktik CSR ini dalam UU no 40/2007 serta peraturan Bapepam terkait. Termasuk dengan adanya *Indonesian Sustainability Reporting Award (ISRA Award)*, dimana hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi citra perusahaan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *stakeholders*

terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya (Febrina & Suaryana, 2011)

Secara umum, standar pelaporan yang sudah dikenal untuk mengimplementasikan CSR yaitu GRI (*Global Reporting Initiative*) ([www. Globalreporting.org](http://www.Globalreporting.org)). Penelitian mengenai pengungkapan CSR dengan menggunakan standar GRI telah digunakan secara luas oleh beberapa peneliti (Almilia & Ikka, 2007; Anggraini, 2006; Rahman & Widyasari, 2008; Sembiring, 2005; Veronica, 2008). Berbagai penelitian tersebut melakukan pengungkapan CSR pada industri manufaktur di Indonesia dengan menggunakan index GRI (78 item). Febrina dan Suaryana (2011) menggunakan 79 item. Selanjutnya, Permata-sari (2012) menggunakan 121 item.

Penerapan GRI pada industri perbankan juga telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Fitria dan Hartanti (2010), melakukan penelitian terhadap 3 bank konvensional dan 3 bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah. Berdasarkan indeks GRI, nilai tertinggi sebesar 46% dan berdasarkan indeks ISR nilai tertinggi sebesar 58%. Pengukuran yang digunakan adalah indeks GRI (72 item) dan *Islamic Social Reporting* (ISR) dikembangkan berdasarkan AAOIFI. Trisnawati (2011) melakukan analisis pengungkapan CSR pada bank konvensional dan syariah di Indonesia menggunakan indeks GRI 78 item. Hasil penelitiannya konsisten dengan temuan Fitria dan Hartanti (2010) bahwa pengungkapan CSR bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah yaitu 52% dan 37%. Selanjutnya Trisnawati, et.al (2012) melakukan analisis pengungkapan CSR pada bank syariah di Indonesia dengan indeks ISR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan dengan ISR sebesar 50.68%.

Penelitian dalam ranah CSR syariah umumnya menggunakan model indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dikembangkan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya (Hanifa, 2002; Maali, Casson & Napier, 2006; Ousama & Fatima, 2006; Sulaiman, 2004; Othman, Thani, & Ghani, 2009). Secara khusus indeks ISR adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Haniffa, 2002). Penelitian terkait dengan pengungkapan CSR pada bank syariah di Indonesia dengan menggunakan indeks ISR yang dikembangkan AAOIFI telah dilakukan Fitria dan Hartanti (2010); Hasan dan Harahap (2010); Sofyani, Wahjuni, Ulum, dan Syam, (2012); serta Azhar dan Trisnawati (2013).

Berbagai hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pengukuran dengan menggunakan indeks GRI (72 item, 78 item, 79 item, dan 121 item) tidak menunjukkan skor pengungkapan yang maksimum, rata-rata pengungkapannya dibawah 50%. Maka penelitian ini didesain untuk melakukan penyesuaian dan konvergensi terhadap indeks GRI (121 item) dan indeks ISR untuk mengukur secara akurat pengungkapan CSR pada bank syariah di Indonesia. Metoda yang digunakan adalah *content analisis* dan *decomposition analisis*, merujuk pada Silber dan Weber (2009) maupun Fitria dan Hartanti (2010). Hasil penelitian ini diharapkan memberikan alternatif pengukuran CSR yang akurat dan dapat diterapkan pada industri perbankan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori dan Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Definisi mengenai CSR atau tanggungjawab sosial perusahaan sekarang ini sangat luas dan beragam. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), CSR didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui

kerjasama dengan komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya masyarakat serta komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini tidaklah bersifat statis dan pasif. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antar *stakeholders*. Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting* yang berisi pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya didalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Global Reporting Initiative* (2008), ditemukan peningkatan yang signifikan jumlah perusahaan yang mengungkapkan CSR dalam laporan keuangannya yaitu dari sekitar 300 perusahaan pada tahun 1996, dan sejumlah 3100 perusahaan pada tahun 2008 (Swa, 2010). Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa pelaporan CSR lebih banyak dilakukan sebagai pengungkapan sukarela dan tidak wajib. Oleh karena itu, bentuk pelaporan keberlanjutan dan format bervariasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dari sisi filosofi konvensional, terdapat beberapa teori yang melatarbelakangi pelaksanaan CSR dalam perusahaan. Pertama, Teori Kapitalisme Milton Friedman (1967). Menurut teori ini, apabila perusahaan melakukan aktivitas CSR di luar kepentingan para pemegang sahamnya, maka itu menyalahi tujuan perusahaan. Satu-satunya kewajiban perusahaan dan termasuk CSR didalamnya adalah memberikan kemakmuran kepada pemegang saham. Aktivitas donasi dibolehkan jika dirasa dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kedua, Teori Kontrak Sosial. Dalam teori ini diyakini bahwa perusahaan hanya dapat berusaha dengan baik jika ia didukung oleh masyarakat sekitarnya. Sehingga dalam hal ini perusahaan akan dianggap sebagai institusi sosial yang harus berkontribusi kepada lingkungan sosialnya. Ketiga, Teori Instrumen. Menurut teori ini CSR dipandang sebagai alat strategi untuk mencapai

tujuan perusahaan. Sehingga menurut teori ini perusahaan dalam melakukan aktivitas CSRnya memiliki tujuan tertentu seperti menciptakan reputasi positif, kehumasan atau manfaat sejenis lainnya. Keempat, Teori Legitimasi. Menurut teori ini, perusahaan akan melakukan aktivitas CSR dikarenakan adanya tekanan sosial, politik dan ekonomi dari luar perusahaan. Sehingga perusahaan akan menyeimbangkan tuntutan tersebut dengan melakukan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang diharuskan oleh peraturan (Deegan, 2002). Kelima, Teori Stakeholder. Aktivitas CSR menurut teori ini dilakukan untuk mengakomodasi keinginan dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga perusahaan dapat beraktivitas dengan baik dengan seluruh dukungan pemangku kepentingan tersebut (Clarkson & Dixon, 1995).

Islamic Social Reporting (ISR)

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks Islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah (*Islamic Social Reporting* atau ISR). Indeks ISR adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Haniffa, 2002). Husain dan Rania (2010), menjelaskan bahwa peningkatan *corporate governance* dalam sistem keuangan Islam mutlak untuk dilakukan, karena nasabah memerlukan jaminan keamanan dana, return yang kompetitif, pelayanan yang memuaskan dan adanya kemudahan akses. Sedangkan bagi bank sendiri penyaluran dana kepada masyarakat memerlukan jaminan dengan tingkat pengembalian yang kompetitif. Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu: pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*). Konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam konteks Islam, masyarakat

mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Baydoun & Willet, 1997).

Haniffa dan Hudaib (2001), menekankan bahwa kerangka konseptual untuk akuntansi Islam harus berdasarkan syariah seperti yang didukung oleh tujuan akuntansi Islam yaitu untuk membantu dalam mencapai keadilan sosial ekonomi (*al-falah*) dan mengakui pemenuhan kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu yang bersangkutan, oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah, dll. sebagai bentuk ibadah. Haniffa dan Hudaib (2001), juga menekankan bahwa organisasi harus mengungkapkan bagaimana perbankan menjalankan tugas dan kewajiban menurut syariah, misalnya urusan mereka yang sah, zakat kepada penerima manfaat, sedekah (*amal / hadiah*), upah, tujuan dari setiap usaha bisnis dan inisiatif untuk melindungi lingkungan. Untuk mencapai tujuan ini, sebuah perusahaan Islam diharapkan untuk mengungkapkan setiap transaksi yang dilarang mereka buat, kewajiban zakat yang masih harus dan telah mereka bayar serta peran tanggung jawab sosial mereka. Ini berarti bahwa pelaporan keuangan di perusahaan-perusahaan Islam lebih rinci dibandingkan dengan pengungkapan perusahaan konvensional.

Fitria dan Hartanti (2010), mengelompokkan indeks ISR menjadi enam indikator pengungkapan yang masing-masing terdapat berbagai item, yaitu: 1) Investasi dan Keuangan, item yang termasuk dalam indikator investasi dan keuangan adalah mengenai sumber dana untuk aktivitas investasi dan pembiayaan yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan transaksi yang diharamkan oleh Islam, serta item mengenai kebijakan organisasi untuk menangani nasabah yang bermasalah. 2) Produk dan Jasa, indikator kedua pada indeks ISR yaitu mengenai produk dan jasa. Item-item pada indikator ini menitikberatkan pada pengungkapan terhadap keluhan atau keluhan

an nasabah. 3) Tenaga Kerja, pada indeks ISR item-item indikator ini tetap menekankan pada prinsip-prinsip Islam yang meliputi karakteristik pekerja, pendidikan dan pelatihan dan persamaan kesempatan dalam bekerja. 4) Sosial, indikator sosial merupakan indikator yang sangat erat hubungannya dengan konsep tanggung jawab sosial. Indikator sosial pada indeks ISR sebagian besar difokuskan pada pengungkapan terkait dengan prinsip-prinsip Islam seperti item sedekah, wakaf, qard hasan, serta kegiatan amal lainnya. 5) Lingkungan, indikator lingkungan pada indeks ISR memiliki item yang berkaitan dalam menekankan pengungkapan terhadap aktivitas dan besarnya dana yang dikeluarkan organisasi untuk aktivitas lingkungannya. 6) Tata Kelola Organisasi, indikator terakhir dalam indeks ISR yaitu indikator tata kelola organisasi. Item pengungkapan terkait transaksi haram (*unlawful transactions*).

Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Industri perbankan di Indonesia saat ini tumbuh cukup pesat, ditambah dengan masalah pengungkapan praktik CSR telah menjadi semakin menonjol dalam akuntansi sosial dan tata kelola perusahaan. Tingkat partisipasi perusahaan dalam CSR dapat dijelaskan ke dalam berbagai motivasi seperti motivasi *accruistic* strategis (Lanros, 2001), motif ekonomi (Hillman & Keim, 2001), motif moral (Payne, 2002), mengurangi risiko bisnis perusahaan (Bourin & Savarina, 2004). Untuk alasan ini, CSR telah mengisyaratkan kepada perusahaan bahwa partisipasi mereka dalam CSR akan direspon oleh publik sehingga mendorong untuk meningkatkan kinerja.

Penelitian mengenai pengungkapan CSR dengan menggunakan standar GRI telah digunakan secara luas oleh beberapa peneliti (Almilia & Ikka, 2007; Anggraini, 2006; Febrina & Suaryana, 2011; Rahman & Widayari, 2008; Sembiring, 2005; Veronica, 2008). Berbagai penelitian tersebut melakukan pengungkapan CSR pada industri manufaktur di Indonesia dengan menggunakan indeks GRI (78 item).

Penerapan GRI pada industri perbankan juga telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Trisnawati (2011) melakukan analisis pengungkapan CSR pada 27 bank konvensional di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 bank yang tidak mengungkapkan CSR. Fitria dan Hartanti (2010), melakukan penelitian terhadap 3 bank konvensional dan 3 bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah.

Penelitian dalam ranah CSR syariah umumnya menggunakan model indeks *Islamic Social Reporting* yang dikembangkan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya (Hanifa, 2002; Maali et al, 2006; Ousama & Fatima, 2006; Sulaiman, 2004; Othman et al, 2009). Secara khusus indeks ISR adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Haniffa, 2002).

Othman, et al. (2009), melakukan penelitian mengenai praktik pelaporan CSR perusahaan syariah yang listing di bursa Malaysia, dan hasilnya memperlihatkan bahwa kebanyakan masih pada tahap konseptual. Hal ini dikarenakan belum adanya standar yang bisa diadopsi perusahaan dalam penerapan CSR syariah tersebut.

Mansur (2012), melakukan penelitian pelaporan CSR perbankan syariah dalam perspektif *syariah enterprise theory* di PT Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri masih belum sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory (SET)*, terutama pada bagian akuntabilitas horizontal terhadap alam. Masih sedikitnya pengungkapan CSR terhadap lingkungan menunjukkan bahwa, Bank Syariah Mandiri memiliki kepedulian yang rendah terhadap lingkungan perusahaan. Selain itu, pengungkapan CSR yang dilakukan Bank Syariah Mandiri (BSM) masih sangat terbatas, secara sukarela, dan mengedepankan

profit dalam tujuan usahanya. Hal ini menjadi tidak selaras dengan tujuan bank syariah yang didirikan dengan dasar agama yang bertujuan menciptakan keseimbangan material dan spiritual bagi pemeluknya.

Sofyani, et al. (2012) melakukan penelitian *Islamic Social Reporting Index*, dengan topik Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia). Dan dari hasil penelitian ini, ditemukan beberapa bukti bahwa secara umum, perbankan syariah di Malaysia memiliki tingkat kinerja sosial yang lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Kedua kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sekitar 10% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2009. Sedangkan tingkat kinerja sosial pada perbankan syariah di Malaysia bisa dikatakan stabil karena tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Ketiga semua bank syariah baik Indonesia maupun Malaysia, masih belum ada satupun yang mencapai skor maksimum. Hal ini dikarenakan adanya sub item dari indeks ISR yang memang tidak mungkin dipenuhi oleh industri perbankan seperti *green product*, *audit environmental*, dan bantuan untuk aktivitas politik. Penelitian selanjutnya mengenai ISR dan kinerja sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) menjadi suatu hal yang penting untuk mendukung praktik tanggungjawab sosial dan syariah di Indonesia.

Sairally (2005), mengevaluasi pelaksanaan CSR pada 250 lembaga keuangan Islam berkesimpulan bahwa pada dasarnya pemahaman dan implikasi etika keuangan Islam bagi pengelola lembaga keuangan Islam harus dipraktikkan secara konsisten terutama dalam pelaksanaan CSR. Akan tetapi menurut hasil kajian ternyata tingkah laku pengelola lembaga keuangan Islam tidak konsisten dengan teori yang berlaku. Indikasinya adalah dana yang sedikit untuk melaksanakan CSR. Alokasi dana yang minimum menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR pada bank syariah masih rendah.

METODA PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah yang terdaftar di bank Indonesia dari tahun 2009 sampai 2011. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, dan Bank Bukopin Syariah. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) yang terdapat di website resmi masing-masing bank syariah dan laporan keuangan diungkapkan secara berturut-turut selama periode 2009-2011. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Dengan kriteria tersebut diperoleh jumlah sampel bank syariah sebanyak 5 bank. Unit analisis dalam laporan keuangan bank syariah yaitu 15 laporan keuangan bank syariah.

Variabel pengungkapan CSR diukur dengan indeks GRI (121 item) yang merujuk pada penelitian Trisnawati, Azhar dan Bangkit (2013) serta Permatasari (2012), yang bersumber pada laporan GRI <http://database.globalreporting.org> pada sektor *Financial services* (3 dan 3.1). Selain itu digunakan indeks ISR (72item) yang dikembangkan oleh AAOIFI yang merujuk pada Haniffa (2002). Daftar item selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.

Analisis data menggunakan *content analysis* terhadap pengungkapan CSR pada bank syariah di Indonesia, baik menggunakan indeks GRI (121 item) maupun indeks ISR yang dikembangkan oleh AAOIFI (72 item). Selanjutnya, berdasarkan hasil pengungkapan CSR tersebut dilakukan *decomposition analysis* dengan melakukan penyesuaian dan atau menghapus beberapa item yang tidak relevan. Artinya jika seluruh bank tidak mengungkapkan item tersebut (memiliki nilai 0) maka

tidak digunakan sebagai alat ukur. Selain itu dipertimbangkan item-item lain yang relevan dengan dasar laporan CSR bank maupun publikasi lain yang bersumber pada website bank tersebut. Konvergensi dilakukan terhadap kedua indeks tersebut (setelah penyesuaian) dengan merujuk pada cara yang dilakukan Fitria dan Hartanti (2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR

Persentase pelaksanaan aktivitas CSR dengan menggunakan indeks ISR di masing-masing bank syariah di Indonesia dilaporkan dalam tabel 1. Tabel 1 menjelaskan tentang hasil skoring yang telah dilakukan pada 5 bank syariah terhadap kinerja sosial kepada pihak yang berkepentingan. Semakin tinggi nilai yang di peroleh pada setiap bank, maka dimungkinkan semakin tinggi juga tingkat tanggung jawab sosial bank yang ada baik dilihat dari indikator investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, lingkungan, serta tata kelola organisasi.

Dari hasil skoring yang telah dilakukan, pada tahun 2009 hingga 2011 terlihat bahwa Bank Mega Syariah dan Bank BRI Syariah memperoleh skor tertinggi, yaitu dengan mencapai persentase masing-masing per tahun sebesar 50.68%, 50.68% dan 50.68%. Hal itu menunjukkan kepedulian Bank Mega Syariah dan BRI Syariah terhadap tanggung jawab sosial lebih besar daripada bank syariah yang lain jika dilihat menggunakan indeks ISR. Sedangkan yang memiliki skor terendah pada tahun 2009 sampai dengan 2011 yaitu Bank Bukopin Syariah dengan persentase tiap tahunnya sebesar 45.21%, 45.21% dan 45.21%. Nilai rata-rata pengungkapan CSR dari 5 bank syariah pada penelitian ini yaitu sebesar 48.75%.

Tabel 1: Tingkat Pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Indeks ISR

Nama Bank	2009	2010	2011	Rata-rata
Bank Muamalat Indonesia	47,95 %	47,95 %	47,95 %	47,95 %
Bank Syariah Mandiri	47,95 %	49,23 %	49,23 %	48,80 %
Bank Mega Syariah	50.68 %	50,68 %	50,68 %	50,68 %
BRI syariah	50.68 %	50,68 %	50,68 %	50,68 %
Bank Bukopin Syariah	45,21 %	45,21 %	46,58 %	45,67 %

Sumber: Trisnawati et al (2012)

Pengungkapan CS/Berdasarkan Indeks GRI

Tabel 2: Tingkat Pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Indeks GRI (121 Item)

Nama Bank	2009	2010	2011	Rata-rata
Bank Muamalat Indonesia	26.45 %	25.62 %	25.62 %	26.04 %
Bank Syariah Mandiri	26.45%	25.62 %	27.27 %	26.45 %
Bank Mega Syariah	22.31 %	18.18 %	19.01 %	19.83 %
BRI syariah	12.40 %	19.01 %	19.83 %	17.08 %
Bank Bukopin Syariah	18.18 %	18.18 %	19.01 %	18.46 %

Sumber: Trisnawati et al (2012)

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada 5 sampel bank syariah (Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin) dianalisis menggunakan indeks GRI pada laporan tahunan masing-masing bank syariah dilaporkan pada tabel 2 di atas.

Bank Muamalat Indonesia dan bank Syariah Mandiri mengungkapkan CSR lebih dari 26%, sedangkan tingkat pengungkapan CSR yang paling rendah yaitu BRI Syariah sebesar 17.08%. Pengukuran indeks GRI dengan 121 item yang berdasarkan pengukuran *Financial Services* (3&G3.1) yang diperoleh dari <http://database.globalreporting.org/>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata pengungkapan CSRnya sebesar 21.54%.

Pengungkapan CSR Berdasarkan Indeks GRI yang disesuaikan

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan CSR masih rendah. Selanjutnya dilakukan *decomposition analysis* dengan melakukan penyesuaian dan atau menghapus beberapa item dalam GRI yang tidak relevan. Secara lengkap cara melakukan *decomposition* dapat dijelaskan pada tabel 3 (lihat di lampiran).

Berdasarkan analisis *decomposition*, dapat dijelaskan bahwa beberapa aspek seperti jaminan, korupsi, komunikasi perusahaan dan masalah pekerja anak adalah item-item yang tidak relevan dalam pengungkapan CSR pada bank syariah. Khusus untuk aspek lingkungan, sebanyak 29 item pengukuran tidak relevan dalam pengungkapan CSR. Item-item tersebut perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan

kegiatan perusahaan yang terkait dengan lingkungan.

Pada aspek lingkungan ini perlu ditambahkan item-item mengenai kegiatan konservasi lingkungan, perlindungan satwa atau habitat lain yang terancam punah, kepedulian terhadap lingkungan pendidikan, memiliki prosedur audit lingkungan, serta memiliki sistem manajemen lingkungan. Berdasarkan laporan bank terkait dengan kegiatan sosialnya, beberapa bank sebenarnya telah melakukan berbagai aktifitas terkait dengan lingkungan seperti: penanaman 3 juta pohon di wilayah pesisir pantai utara, partisipasi dalam kegiatan *green-climate*, memberikan fasilitas terkait penciptaan energi ramah lingkungan, pembentukan dan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang belum dimasukkan dalam item-item GRI. Selain itu aspek sosial belum diungkapkan pula dalam indeks GRI. Maka dilakukan konvergensi terhadap item-item pengungkapan CSR pada indeks ISR.

Merujuk pada Fitria dan Hartanti (2010), ada beberapa indikator yang tidak terdapat pada indeks GRI dan sebaliknya. Konvergensi ini dilakukan untuk memberikan standar pengungkapan yang dapat diterima secara umum dengan tetap berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya untuk industri perbankan syariah saja, tetapi juga dapat diterapkan pada perbankan konvensional. Penjelasan mengenai konvergensi pengungkapan CSR di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Investasi dan keuangan

Item-item yang ada pada indikator ini tidak terdapat pada indeks GRI. Item yang termasuk

dalam indikator investasi dan keuangan adalah mengenai sumber dana untuk aktivitas investasi dan pembiayaan yang terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan transaksi yang diharamkan oleh Islam, serta item mengenai kebijakan organisasi untuk menangani nasabah yang bermasalah. Seluruh item tidak diungkapkan pada indeks GRI dikarenakan indikator ini benar-benar menekankan pada pengungkapan yang difokuskan pada prinsip-prinsip etis Islam.

Aspek sosial

Pada indeks ISR aspek ini termasuk pada indikator ke empat yang mencakup: sedekah, wakaf, qard hasan, relawan bencana, bantuan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan, pundi amal, mendukung program kesehatan. Pengungkapan ini sangat penting karena berdasarkan hasil laporan bank, semua bank syariah di Indonesia melaksanakan aktifitas tersebut sebagai implementasi dari CSR. Pada indeks GRI, aspek sosial ini hanya diungkapkan dalam bahasan yang sangat umum yaitu item no. 50 dan no. 105 mengenai dampak ekonomi tidak langsung terhadap masyarakat. Pada aspek ini, pengungkapan CSR lebih baik menggunakan indeks ISR.

Tenaga kerja

Pada indikator ini, item pengungkapan tenaga kerja yang digunakan relatif sama yang mencakup meliputi karakteristik pekerjaan, pelatihan dan pendidikan karyawan, serta persamaan kesempatan. Indeks GRI lebih lengkap dengan memasukkan aspek hubungan buruh dan manajemen, kesehatan dan keselamatan kerja.

Tatakelola organisasi

Item-item yang digunakan dalam indeks ISR pada aspek ini sesuai dengan item-item dalam indeks GRI. Perbedaannya meliputi kepatuhan organisasi terhadap peraturan, identifikasi kegiatan yang dilarang: monopoli, manipulasi harga, korupsi dan sebagainya. Pada indeks ISR lebih dihususkan pada kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam agama Islam termasuk

persentase pekerja muslim terhadap total karyawan. Pada aspek tatakelola di indeks GRI lebih luas cakupannya karena mencakup pemerintahan, komitmen terhadap pihak eksternal dan keterlibatan *stakeholder*. Pada aspek ini lebih baik menggunakan indeks GRI.

Produk dan jasa

Persamaan item-item pada indikator ini baik pada indeks ISR maupun indeks GRI adalah menekankan pada pengungkapan terhadap komplain atau keluhan nasabah, ketidaktaatan pada peraturan dan survei kepuasan pelanggan. Pada indeks GRI tanggung jawab terhadap produk dan jasa ini lebih diperinci pada masalah kesehatan dan keselamatan pelanggan, komunikasi pemasaran, privasi pelanggan dan mengungkapkan jumlah keluhan nasabah maupun besarnya denda yang dibayarkan jika melanggar aturan. Pada aspek ini lebih baik menggunakan indeks GRI.

Lingkungan

Pada indeks GRI, semua bank tidak mengungkapkan pada aspek ini. Hal ini disebabkan item-item pada indeks GRI tidak relevan untuk mengukur kinerja lingkungan. Pada aspek lingkungan, implementasi dari laporan CSR bank menunjukkan bahwa item-item yang ada pada indeks ISR lebih tepat untuk mengukur kinerja lingkungan. Aspek ini meliputi konservasi lingkungan, perlindungan satwa/habitat yang terancam punah, pencegahan pencemaran lingkungan, pendidikan lingkungan, kepedulian terhadap isu *green world*, audit lingkungan, serta pembentukan sistem manajemen lingkungan.

Berdasarkan hasil konvergensi di atas, maka direkomendasikan untuk mengukur pengungkapan CSR pada bank syariah di Indonesia dengan menggunakan indikator (1) strategi dan analisa, (2) profil organisasi, (3) parameter laporan, (4) tatakelola organisasi, (5) kinerja ekonomi, (6), kinerja lingkungan, (7) kinerja sosial, (8) ketenagakerjaan, (9) masyarakat dan (10) tanggung jawab terhadap produk. Untuk indikator investasi dan keuangan yang mencakup aktifitas aktifitas *riba*, *gharar*, zakat, kebijakan mengatasi keter-

lambatan pembayaran oleh klien yang gagal bayar dimasukkan sebagai suplemen karena indikator ini sangat spesifik dan seluruh bank syariah mengungkapkannya. Secara lengkap pengukuran yang sudah dikonvergensi tersebut dapat dijelaskan pada tabel 4.

Tabel 3: Pengungkapan CSR Berdasarkan Indeks GRI yang disesuaikan

No	Kode GRI	Item-item Pengungkapan	Analisis
1		Strategi dan Analisa	
1	1.1	Pernyataan dari pembuat keputusan yang paling senior dari organisasi (misalnya, CEO,) tentang relevansi keberlanjutan organisasi dan strategi yang dijalankan	Relevan
2	1.2	Deskripsi dampak penting mengenai risiko, dan peluang.	Relevan
2		Profil Organisasi	
3	2.1	Nama organisasi.	Relevan
4	2.2	Nama merek, produk, dan / atau jasa.	Relevan
5	2.3	Struktur organisasi, anak perusahaan, dan usaha patungan.	Relevan
6	2.4	Lokasi organisasi.	Relevan
7	2.5	Negara di mana organisasi beroperasi	Relevan
8	2.6	Sifat kepemilikan dan bentuk hukum.	Relevan
9	2.7	Pasar yang dilayani (termasuk rincian geografis, sektor dilayani, dan jenis pelanggan).	Relevan
10	2.8	Skala pelaporan organisasi.	Relevan
11	2.9	Perubahan yang signifikan selama periode pelaporan mengenai ukuran, struktur, atau kepemilikan termasuk: Lokasi, atau perubahan dalam operasi, ekspansi; Perubahan dalam struktur modal saham dan pembentukan modal lainnya).	Relevan
12	2.10	Penghargaan yang diterima dalam periode pelaporan.	Relevan
3		Parameter Laporan	
		Profil laporan	
13	3.1	Periode pelaporan	Relevan
14	3.2	Tanggal laporan terkini	Relevan
15	3.3	Pelaporan siklus (tahunan, dua tahunan, dll).	Relevan
16	3.4	kontak person untuk pertanyaan mengenai laporan atau isinya.	Relevan
		Cakupan dan Batas laporan	
17	3.5	Proses untuk menentukan isi laporan	Relevan
18	3.6	Batas dari laporan (misalnya, negara, divisi, anak perusahaan, usaha patungan, pemasok).	Relevan
19	3.7	Ada pembatasan tertentu pada lingkup atau batas laporan.	Relevan
20	3.8	Dasar pelaporan usaha patungan, anak perusahaan, fasilitas disewakan, operasi outsourcing, dan entitas lainnya yang secara signifikan dapat mempengaruhi komparabilitas dari periode ke periode dan / atau antara organisasi.	Relevan
21	3.9	Pengukuran teknik dan dasar perhitungan, termasuk asumsi dan teknik yang mendasari estimasi diterapkan pada penyusunan Indikator dan informasi lainnya dalam laporan.	Relevan
22	3.10	Penjelasan efek dari setiap penyajian kembali informasi yang diberikan dalam laporan sebelumnya, (misalnya, merger / akuisisi, perubahan tahun dasar / periode, metode pengukuran).	Relevan
23	3.11	Perubahan yang signifikan dari periode pelaporan sebelumnya dalam lingkup, batas, atau metode pengukuran yang diterapkan dalam laporan.	Relevan
24	3.12	Tabel yang mengidentifikasi lokasi dari Standar Pengungkapan dalam laporan.	Tidak Relevan
		Jaminan	
25	3.13	Kebijakan dan praktik saat ini yang berkenaan dengan jaminan eksternal untuk laporan. Juga menjelaskan hubungan antara organisasi dan penyedia jaminan.	Tidak relevan
4		Pemerintahan, Komitmen, dan Keterlibatan	
		Pemerintahan	
26	4.1	Struktur tata kelola organisasi,	Relevan
27	4.2	Menunjukkan apakah Ketua tata kelola tertinggi juga merupakan executive officer	Relevan
28	4.3	Menunjukkan jumlah anggota dari badan tata kelola tertinggi yang independen dan / atau anggota non-eksekutif.	Relevan
29	4.4	Mekanisme bagi pemegang saham dan karyawan untuk memberikan rekomendasi kepada dewan direksi	Relevan
30	4.5	Hubungan antara kompensasi untuk anggota direksi, manajer senior, dan eksekutif dan kinerja organisasi (termasuk kinerja sosial dan lingkungan).	Relevan
31	4.6	Proses untuk memastikan konflik kepentingan dihindari.	Tidak relevan
32	4.7	Proses untuk menentukan kualifikasi dan keahlian dari anggota dewan direksi untuk mengatur strategi organisasi pada lingkup ekonomi, topik lingkungan, dan sosial.	Relevan
33	4.8	Pernyataan misi atau nilai-nilai, kode etik, dan prinsip-prinsip yang relevan dengan ekonomi, kinerja lingkungan, dan sosial.	Relevan
34	4.9	Prosedur dewan direksi untuk mengawasi organisasi dan manajemen ekonomi, kinerja lingkungan, dan sosial, termasuk risiko yang relevan dan kepatuhan dengan standar yang disepakati secara internasional, kode etik, dan prinsip-prinsip.	Relevan
35	4.10	Proses untuk mengevaluasi kinerja dewan direksi khususnya yang berkaitan dengan ekonomi, kinerja lingkungan, dan sosial.	Relevan
		Komitmen untuk Inisiatif Eksternal	
36	4.11	Perusahaan terlibat dalam perjanjian dengan pihak luar mengenai masalah ekonomi, lingkungan dan social	Relevan
37	4.12	Adanya inisiatif untuk terlibat dengan pihak luar yang diikuti atau didukung oleh organisasi.	Tidak Relevan

No	Kode GRI	Item-item Pengungkapan	Analisis
38	4.13	Keanggotaan dalam asosiasi (seperti asosiasi industri) dan / atau organisasi advokasi nasional / internasional di mana organisasi memiliki posisi di pemerintahan; berpartisipasi dalam proyek-proyek; menyediakan dana substantif di luar iuran keanggotaan rutin; Stakeholder Engagement	Relevan
39	4.14	Daftar <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam organisasi.	Relevan
40	4.15	Dasar untuk identifikasi dan seleksi dari para pemangku kepentingan yang terlibat.	Relevan
41	4.16	Pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk frekuensi keterlibatan menurut jenis dan kelompok stakeholder.	Relevan
42	4.17	<i>Topik utama yang telah diangkat melalui keterlibatan pemangku kepentingan, dan bagaimana organisasi telah menanggapi topik-topik utama tersebut</i>	Tidak relevan
5	EC	Pendekatan manajemen dan Indikator Kinerja Ekonomi Ekonomi: Pengungkapan pada Pendekatan Manajemen Transparansi dalam item pendekatan Manajemen dengan mengacu pada Aspek Ekonomi berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Ekonomi • Kehadiran Pasar • Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indikator Kinerja Ekonomi Aspek: Kinerja Ekonomi	
43	EC1	Nilai ekonomi yang dihasilkan secara langsung dan didistribusikan, termasuk pendapatan, biaya operasi, kompensasi karyawan, sumbangan dan investasi masyarakat lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyedia modal dan pemerintah.	Relevan
44	EC2	Implikasi keuangan dan risiko lainnya dan peluang untuk kegiatan organisasi karena perubahan iklim.	Relevan
45	EC3	Penjelasan mengenai rencana usaha termasuk tingkat keuntungan yang akan dihasilkan	Relevan
46	EC4	Bantuan keuangan signifikan yang diterima dari pemerintah. Aspek: Kehadiran Pasar	Relevan
47	EC5	Rentang rasio upah perusahaan dibandingkan dengan upah minimum setempat di lokasi yang sama	Relevan
48	EC6	<i>Kebijakan, praktik, dan proporsi pengeluaran pada pemasok lokal yang berbasis di lokasi operasi perusahaan.</i>	Tidak Relevan
49	EC7	Prosedur untuk mempekerjakan masyarakat setempat di lokasi operasi perusahaan. Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	Relevan
50	EC8	Pengembangan dan dampak investasi infrastruktur dan layanan yang diberikan terutama untuk kepentingan publik melalui komersial, dalam bentuk keterlibatan lainnya	Relevan
51	EC9	Memahami dan mendeskripsikan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	Relevan
6	EN	Lingkungan Lingkungan: Pengungkapan Pendekatan Manajemen PENGUNGKAPAN TENTANG PENDEKATAN MANAJEMEN dengan mengacu pada Aspek Lingkungan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Bahan • Energi • Air • Keanekaragaman Hayati • Emisi, dan Limbah • Produk dan Jasa • Kepatuhan • Transportasi • Keseluruhan. Indikator Kinerja Lingkungan Aspek: Bahan	
52	EN1	<i>Bahan yang digunakan (berat atau volume)</i>	Tidak relevan
53	EN2	<i>Persentase bahan yang digunakan yang didaur ulang.</i> Aspek: Energi	Tidak relevan
54	EN3	<i>Energi langsung yang dikonsumsi dari sumber energi primer.</i>	Tidak relevan
55	EN4	<i>Energi tidak langsung yang dikonsumsi dari sumber primer.</i>	Tidak relevan
56	EN5	<i>Energi yang disimpan karena perbaikan konservasi dan efisiensi.</i>	Tidak relevan
57	EN6	<i>Inisiatif untuk menyediakan energi-efisien atau energi terbarukan berbasis produk dan layanan,</i>	Tidak relevan
58	EN7	<i>Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai.</i> Aspek: Air	Tidak relevan
59	EN8	<i>Air yang diambil dari sumber (mata air)</i>	Tidak relevan
60	EN9	<i>Sumber air secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air dari sumber</i>	Tidak relevan
61	EN10	<i>Persentase dan volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali.</i> Aspek: Keanekaragaman Hayati	Tidak relevan
62	EN11	<i>Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berbatasan dengan kawasan lindung</i>	Tidak relevan
63	EN12	<i>Deskripsi dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan layanan terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung</i>	Tidak relevan
64	EN13	<i>Habitat yang dilindungi.</i>	Tidak relevan
65	EN14	<i>Strategi, tindakan saat ini, dan rencana masa depan untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.</i>	Tidak relevan
66	EN15	<i>Jumlah spesies konservasi nasional di daerah operasi perusahaan dengan tingkat risiko kepunahan.</i>	Tidak relevan

No	Kode GRI	Item-item Pengungkapan	Analisis
		Aspek: Emisi dan Limbah	
67	EN16	Jumlah emisi gas rumah kaca baik secara langsung dan tidak langsung pada ambang yang berat	Tidak relevan
68	EN17	emisi gas rumah kaca lainnya yang tidak langsung pada ambang yang berat	Tidak relevan
69	EN18	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan jumlah pengurangan dicapai.	Tidak relevan
70	EN19	Emisi zat yang dihasilkan merusak ozon.	Tidak relevan
71	EN20	NOx, SOx, dan emisi udara lainnya yang signifikan menurut jenis dan berat.	Tidak relevan
72	EN21	Jumlah debit air dengan kualitas yang rendah	Tidak relevan
73	EN22	Volume limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan.	Tidak relevan
74	EN23	Total jumlah dan volume pembuangan, signifikan	Tidak relevan
75	EN24	Perlakuan terhadap limbah dianggap berbahaya (dikirim, ekspor, impor)	Tidak relevan
76	EN25	Identitas, ukuran, status dan nilai keanekaragaman hayati yang dilindungi dan habitat air yang berhubungan secara signifikan oleh pembuangan limbah organisasi. Jika jawabannya adalah "Tidak ada data," komentar atau menjelaskan mengapa data tidak disediakan.	Tidak relevan
		Aspek: Produk dan Layanan	
77	EN26	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk dan jasa yang dihasilkan	Tidak relevan
78	EN27	Persentase produk yang dijual dan bahan kemasan yang dapat direklamasi berdasarkan kategori.	Tidak relevan
		Aspek: Kepatuhan	
79	EN28	Nilai uang denda yang signifikan dari total jumlah sanksi non-moneter terkait pelanggaran hukum lingkungan dan peraturan.	Relevan
		Aspek: Transportasi	
80	EN29	Dampak lingkungan yang signifikan dalam mengangkut produk dan barang lainnya yang digunakan untuk operasi organisasi, (termasuk angkutan untuk pekerja)	Tidak relevan
		Aspek: Keseluruhan	
81	EN30	Jumlah pengeluaran perusahaan untuk perlindungan terhadap lingkungan.	Relevan
7		Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak	
LA		Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak: Pengungkapan pada Pendekatan Manajemen	
		PENGUNGKAPAN TENTANG PENDEKATAN MANAJEMEN dengan mengacu pada Deklarasi Tripartit ILO Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial (khususnya konvensi inti delapan dari ILO) harus menjadi titik acuan utama.	
		<ul style="list-style-type: none"> • Ketenagakerjaan • Hubungan Buruh dan Manajemen • Kesehatan dan Keselamatan Kerja • Pelatihan dan Pendidikan • Keanekaragaman dan persamaan kesempatan 	
		Praktek Tenaga Kerja dan Indikator Kinerja Pekerjaan yang Layak	
		Aspek: Pekerjaan	
82	LA1	Jumlah tenaga kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak kerja, dan wilayah.	Relevan
83	LA2	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan wilayah.	Relevan
84	LA3	Manfaat yang diberikan kepada karyawan penuh-waktu berbeda dengan karyawan sementara atau paruh waktu [Mengidentifikasi manfaat yang ditawarkan kepada semua karyawan dan menunjukkan apakah ada perbedaan antara karyawan penuh dan paruh waktu].	Relevan
		Aspek: Hubungan Buruh dan Manajemen	
85	LA4	Persentase karyawan yang tercakup dalam perjanjian bersama	Relevan
86	LA5	Pemberitahuan perubahan operasional yang signifikan, termasuk apakah itu ditetapkan dalam kesepakatan kolektif.	Relevan
		Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Kerja	
87	LA6	Adanya komite keselamatan kerja yang membantu untuk memantau dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan.	Relevan
88	LA7	Tingkat cedera, penyakit akibat kerja, ketidakhadiran, dan jumlah kematian yang berhubungan dengan pekerjaan berdasarkan wilayah.	Relevan
89	LA8	Pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan, dan pengendalian melalui program kesehatan dan keselamatan untuk membantu tenaga kerja, keluarga mereka, atau anggota masyarakat mengenai penyakit serius.	Relevan
90	LA9	Adanya layanan kesehatan dan keselamatan dalam perjanjian formal dengan serikat buruh.	Relevan
		Aspek: Pelatihan dan Pendidikan	
91	LA10	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan berdasarkan kategori karyawan.	Relevan
92	LA11	Program manajemen keterampilan dan pembelajaran secara kontinyu yang mendukung kerja dari karyawan dan membantu mereka dalam mengelola akhir karir.	Relevan
93	LA12	Persentase karyawan yang menerima kesempatan pengembangan karir secara berkala.	Relevan
		Aspek: Keragaman dan Kesetaraan Kesempatan	
94	LA13	Komposisi tatakelola dari karyawan per kategori sesuai dengan indikator jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan lainnya keanekaragaman.	Relevan
95	LA14	Rasio gaji pokok perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan.	Relevan
8		Hak Asasi Manusia	
HR		Hak Asasi Manusia: Pengungkapan pada Pendekatan Manajemen	
		PENGUNGKAPAN TENTANG PENDEKATAN MANAJEMEN dengan mengacu pada Aspek Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Tripartit ILO Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial (khususnya konvensi inti ILO delapan yang terdiri dari Konvensi 100., 111 87, 98, 138, 182, 20 dan 1059 harus menjadi titik acuan utama.	
		<ul style="list-style-type: none"> • Investasi dan Praktek Pengadaan • Non-diskriminasi 	

No	Kode GRI	Item-item Pengungkapan	Analisis
		<ul style="list-style-type: none"> Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif Penghapusan Buruh Anak Pencegahan kewajiban Kerja Paksa Pengaduan Keluhan dan Praktek Praktek keamanan Hak Adat 	
		Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia	
		Aspek: Investasi dan Praktek Pengadaan	
96	HR1	Persentase dan jumlah perjanjian dari investasi yang signifikan yang mencakup klausul hak asasi manusia	Tidak Relevan
97	HR2	Persentase pemasok dan kontraktor yang telah memahami tentang hak asasi manusia dan tindakan yang dilakukan	Tidak relevan
98	HR3	Jumlah jam pelatihan karyawan terkait kebijakan dan prosedur tentang aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi perusahaan	Tidak Relevan
		Aspek: Non-Diskriminasi	
99	HR4	Jumlah insiden diskriminasi dan tindakan yang sudah dilakukan	Tidak Relevan
		Aspek: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif	
100	HR5	Adanya hak untuk menjalankan kebebasan berserikat dan perundingan bersama yang mungkin beresiko dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak ini.	Tidak Relevan
		Aspek: Pekerja Anak	
101	HR6	Memiliki risiko yang signifikan untuk pekerja anak, dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi pada penghapusan pekerja anak.	Tidak Relevan
		Aspek: kewajiban Kerja Paksa	
102	HR7	Memiliki langkah-langkah yang diambil untuk berkontribusi pada penghapusan kerja paksa	Tidak Relevan
		Aspek: Praktek Keamanan	
103	HR8	Persentase petugas keamanan yang dilatih mengenai prosedur tentang aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi perusahaan	Tidak Relevan
		Aspek: Hak Adat	
104	HR9	Jumlah insiden yang melibatkan pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil.	Tidak Relevan
	9	Masyarakat	
	SO	Masyarakat: Pengungkapan pada Pendekatan Manajemen	
		PENGUNGKAPAN TENTANG PENDEKATAN MANAJEMEN dengan mengacu pada Aspek:	
		<ul style="list-style-type: none"> Komunitas Korupsi Kebijakan Publik Perilaku anti-kompetitif Kepatuhan 	
		Masyarakat: Indikator Kinerja	
		Aspek: Komunitas	
105	SO1	Efektivitas dari setiap program (dampaknya pada masyarakat)	Relevan
		Aspek: Korupsi	
106	SO2	Persentase dan jumlah total unit bisnis yang berkaitan dengan korupsi.	Tidak relevan
107	SO3	Persentase karyawan yang terlatih dalam memahami kebijakan dan prosedur anti korupsi	Tidak Relevan
108	SO4	Tindakan yang diambil dalam menanggapi insiden korupsi.	Relevan
		Aspek: Kebijakan Publik	
109	SO5	Berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan publik dan lobi.	Relevan
110	SO6	Total nilai kontribusi keuangan kepada partai politik, politisi, dan lembaga terkait dengan negara.	Relevan
		Aspek: Anti-Perilaku Kompetitif	
111	SO7	Tindakan hukum yang dilakukan untuk menangani perilaku anti-persaingan, anti-trust, dan praktik-praktik monopoli.	Relevan
		Aspek: Kepatuhan	
112	SO8	Nilai uang denda yang signifikan dan total jumlah sanksi non-moneter akibat pelanggaran hukum dan peraturan (misalnya hak asasi manusia).	Relevan
	10	Tanggung Jawab Produk	
	PR	Tanggung Jawab produk: Pengungkapan pada Pendekatan Manajemen	
		PENGUNGKAPAN TENTANG PENDEKATAN MANAJEMEN mengacu pada Aspek:	
		<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan Produk dan Layanan Pelabelan Komunikasi pemasaran Pelanggan Privasi Kepatuhan 	
		Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk	
		Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	
113	PR1	Prosentase produk atau layanan yang memiliki dampak kesehatan dan keselamatan dan adanya prosedur yang mengatur.	Relevan
114	PR2	Jumlah insiden yang tidak sesuai dengan peraturan mengenai dampak kesehatan dan keamanan pelanggan	Tidak relevan
		Aspek: Pelabelan Produk dan Layanan	
115	PR3	Adanya prosedur dan persyaratan terkait informasi produk dan layanan yang diperlukan	Relevan
116	PR4	Jumlah insiden yang tidak sesuai dengan peraturan tentang informasi produk dan layanan dan pelabelan	Tidak relevan
117	PR5	Praktek yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan, termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.	Relevan

No	Kode GRI	Item-item Pengungkapan	Analisis
118	PR6	Aspek: Komunikasi Pemasaran Program yang berhubungan dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsor.	Relevan
119	PR7	Jumlah insiden yang tidak sesuai dengan peraturan terkait komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsor.	Tidak relevan
120	PR8	Aspek: Privasi Pelanggan Total jumlah keluhan pelanggan dan kerugian pelanggan dan diperkuat tentang pelanggaran privasi	Relevan
121	PR9	Aspek: Kepatuhan Nilai uang denda yang signifikan yang dibayar karena pelanggaran hukum dan peraturan mengenai penyediaan dan penggunaan produk dan layanan.	Relevan

*Jumlah keseluruhan: 70 item yang relevan

Tabel 4: Pengungkapan CSR hasil konvergensi GRI dan ISR

No	Kode GRI	Item-item Pengungkapan
1		Strategi dan Analisa
1	1.1	Pernyataan dari pembuat keputusan yang paling senior dari organisasi (misalnya, CEO,) tentang relevansi keberlanjutan organisasi dan strategi yang dijalankan
2	1.2	Deskripsi dampak penting mengenai risiko, dan peluang.
2		Profil Organisasi
3	2.1	Nama organisasi.
4	2.2	Nama merek, produk, dan / atau jasa.
5	2.3	Struktur organisasi, anak perusahaan, dan usaha patungan.
6	2.4	Lokasi organisasi.
7	2.5	Negara di mana organisasi beroperasi
8	2.6	Sifat kepemilikan dan bentuk hukum.
9	2.7	Pasar yang dilayani (termasuk rincian geografis, sektor dilayani, dan jenis pelanggan).
10	2.8	Skala pelaporan organisasi.
11	2.9	Perubahan yang signifikan selama periode pelaporan mengenai ukuran, struktur, atau kepemilikan termasuk: lokasi, atau perubahan dalam operasi, ekspansi; perubahan dalam struktur modal saham dan pembentukan modal lainnya).
12	2.10	Penghargaan yang diterima dalam periode pelaporan.
3		Parameter Laporan
		Profil laporan
13	3.1	Periode pelaporan
14	3.2	Tanggal laporan terkini
15	3.3	Pelaporan siklus (tahunan, dua tahunan, dll).
16	3.4	Kontak person untuk pertanyaan mengenai laporan atau isinya.
		Cakupan dan Batas laporan
17	3.5	Proses untuk menentukan isi laporan
18	3.6	Batas dari laporan (misalnya, negara, divisi, anak perusahaan, usaha patungan, pemasok).
19	3.7	Ada pembatasan tertentu pada lingkup atau batas laporan.
20	3.8	Dasar pelaporan usaha patungan, anak perusahaan, fasilitas disewakan, operasi <i>outsourcing</i> , dan entitas lainnya yang secara signifikan dapat mempengaruhi komparabilitas dari periode ke periode dan / atau antara organisasi.
21	3.9	Pengukuran teknik dan dasar perhitungan, termasuk asumsi dan teknik yang mendasari estimasi diterapkan pada penyusunan indikator dan informasi lainnya dalam laporan.
22	3.10	Penjelasan efek dari setiap penyajian kembali informasi yang diberikan dalam laporan sebelumnya, (misalnya, merger / akuisisi, perubahan tahun dasar / periode, metode pengukuran).
23	3.11	Perubahan yang signifikan dari periode pelaporan sebelumnya dalam lingkup, batas, atau metoda pengukuran yang diterapkan dalam laporan.
4		Tata kelola organisasi
24	4.1	Struktur tata kelola organisasi
25	4.2	Menunjukkan apakah ketua tata kelola tertinggi juga merupakan <i>executive officer</i>
26	4.3	Menunjukkan jumlah anggota dari badan tata kelola tertinggi yang independen dan / atau anggota non-eksekutif.
27	4.4	Mekanisme bagi pemegang saham dan karyawan untuk memberikan rekomendasi kepada dewan direksi
28	4.5	Hubungan antara kompensasi untuk anggota direksi, manajer senior, dan eksekutif dan kinerja organisasi (termasuk kinerja sosial dan lingkungan).
29	4.6	Proses untuk menentukan kualifikasi dan keahlian dari anggota dewan direksi untuk mengatur strategi organisasi pada lingkup ekonomi, topik lingkungan, dan sosial.
30	4.7	Pernyataan misi atau nilai-nilai, kode etik, dan prinsip-prinsip yang relevan dengan ekonomi, kinerja lingkungan, dan sosial.
31	4.8	Prosedur dewan direksi untuk mengawasi organisasi dan manajemen ekonomi, kinerja lingkungan, dan sosial, termasuk risiko yang relevan dan kepatuhan dengan standar yang disepakati secara internasional, kode etik, dan prinsip-prinsip.
32	4.9	Proses untuk mengevaluasi kinerja dewan direksi khususnya yang berkaitan dengan ekonomi, kinerja lingkungan, dan sosial.
33	4.10	Perusahaan terlibat dalam perjanjian dengan pihak luar mengenai masalah ekonomi, lingkungan dan social
34	4.11	Keanggotaan dalam asosiasi (seperti asosiasi industri) dan / atau organisasi advokasi nasional / internasional di mana organisasi memiliki posisi di pemerintahan; berpartisipasi dalam proyek-proyek; menyediakan dana substantif di luar iuran keanggotaan rutin;
35	4.12	Daftar <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam organisasi.
36	4.13	Dasar untuk identifikasi dan seleksi dari para pemangku kepentingan yang terlibat.

No	Kode GRI	Item-item Pengungkapan
	5	Kinerja Ekonomi
	EC	Transparansi dalam item indikator kinerja ekonomi mengacu pada aspek ekonomi berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Ekonomi • Kehadiran Pasar • Dampak Ekonomi Tidak Langsung
		Indikator Kinerja Ekonomi
		Aspek: Kinerja Ekonomi
37	EC1	Nilai ekonomi yang dihasilkan secara langsung dan didistribusikan, termasuk pendapatan, biaya operasi, kompensasi karyawan, sumbangan dan investasi masyarakat lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyedia modal dan pemerintah.
38	EC2	Implikasi keuangan dan risiko lainnya dan peluang untuk kegiatan organisasi karena perubahan iklim.
39	EC3	Penjelasan mengenai rencana usaha termasuk tingkat keuntungan yang akan dihasilkan.
No	Kode GRI	Item-item Pengungkapan
40	EC4	Bantuan keuangan signifikan yang diterima dari pemerintah.
		Aspek: Kehadiran Pasar
41	EC5	Rentang rasio upah perusahaan dibandingkan dengan upah minimum setempat di lokasi yang sama
42	EC6	Prosedur untuk mempekerjakan masyarakat setempat di lokasi operasi perusahaan.
		Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung
43	EC7	Pengembangan dan dampak investasi infrastruktur dan layanan yang diberikan terutama untuk kepentingan publik melalui komersial, dalam bentuk keterlibatan lainnya.
44	EC8	Memahami dan mendeskripsikan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan.
	6	Kinerja Lingkungan
	EN	Indikator Kinerja Lingkungan
45	EN 1	Koservasi lingkungan
46	EN2	Perlindungan satwa/habitat yang terancam punah
47	EN3	Pencegahan pencemaran lingkungan
48	EN 4	Kepedulian terhadap isu lingkungan (<i>green world</i>)
49	EN 5	Pendidikan lingkungan
50	EN 6	Keterlibatan pada penciptaan produk ramah lingkungan
51	EN 7	Keterlibatan pada penciptaan energi terbarukan
52	EN 8	Audit lingkungan
53	EN 9	Pembentukan sistem manajemen lingkungan
		Aspek: Keseluruhan
54	EN10	Jumlah pengeluaran perusahaan untuk perlindungan terhadap lingkungan.
	7	Kinerja social
	ES	Indikator Kinerja Sosial
55	ES 1	Sedekah
56	ES 2	Wakaf
57	ES 3	Qard hasan
59	ES 4	Relawan bencana
60	ES 5	Bantuan pendidikan
61	ES 6	Pemberdayaan masyarakat
62	ES 7	Pemberian bantuan pundi amal
63	ES 8	Bantuan program kesehatan
		Aspek: keseluruhan
64	ES 9	Jumlah pengeluaran perusahaan untuk bantuan sosial
	8	Indikator Ketenagakerjaan
	LA	Aspek: pekerjaan
65	LA1	Jumlah tenaga kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak kerja, dan wilayah.
66	LA2	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan wilayah.
67	LA3	Manfaat yang diberikan pada karyawan penuh-waktu beda dengan karyawan sementara/paruh waktu [Mengidentifikasi manfaat yang ditawarkan kepada semua karyawan dan menunjukkan apakah ada perbedaan antara karyawan penuh dan paruh waktu].
		Aspek: hubungan buruh dan manajemen
68	LA4	Persentase karyawan yang tercakup dalam perjanjian bersama
69	LA5	Pemberitahuan perubahan operasional yang signifikan, termasuk apakah itu ditetapkan dalam kesepakatan kolektif.
		Aspek: Kesehatan dan keselamatan kerja
70	LA6	Adanya komite keselamatan kerja yang membantu untuk memantau dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan.
71	LA7	Tingkat cedera, penyakit akibat kerja, ketidakhadiran, dan jumlah kematian yang berhubungan dengan pekerjaan berdasarkan wilayah.
72	LA8	Pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan, dan pengendalian melalui program kesehatan dan keselamatan untuk membantu tenaga kerja, keluarga mereka, atau anggota masyarakat mengenai penyakit serius.
73	LA9	Adanya layanan kesehatan dan keselamatan dalam perjanjian formal dengan serikat buruh.
		Aspek: Pelatihan dan Pendidikan
74	LA10	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan berdasarkan kategori karyawan.
75	LA11	Program manajemen keterampilan dan pembelajaran secara kontinyu yang mendukung kerja dari karyawan dan membantu mereka dalam mengelola akhir karir.
76	LA12	Persentase karyawan yang menerima kesempatan pengembangan karir secara berkala.
		Aspek: Keragaman dan Kesenjangan Kesempatan
77	LA13	Komposisi tatakelola dari karyawan per kategori sesuai dengan indikator jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan lainnya keanekaragaman.
78	LA14	Rasio gaji pokok perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan.

No	Kode GRI	Item-item Pengungkapan
9	SO	Masyarakat
		Indikator Kinerja Masyarakat
		Aspek: Komunitas
79	SO1	Efektivitas dari setiap program (dampaknya pada masyarakat)
		Aspek: Korupsi
80	SO2	Tindakan yang diambil dalam menanggapi insiden korupsi.
		Aspek: Kebijakan Publik
81	SO3	Berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan publik dan lobi.
82	SO4	Total nilai kontribusi keuangan kepada partai politik, politisi, dan lembaga terkait dengan negara.
		Aspek: Anti-Perilaku Kompetitif
83	SO5	Tindakan hukum yang dilakukan untuk menangani perilaku anti-persaingan, anti-trust, dan praktik-praktik monopoli.
		Aspek: Kepatuhan
84	SO6	Nilai uang denda yang signifikan dan total jumlah sanksi non-moneter akibat pelanggaran hukum dan peraturan (misal hak asasi manusia).
10	PR	Tanggung Jawab Produk
		Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk
		Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan
85	PR1	Persentase produk atau layanan yang memiliki dampak kesehatan dan keselamatan dan adanya prosedur yang mengatur.
		Aspek: Pelabelan Produk dan Layanan
86	PR2	Adanya prosedur dan persyaratan terkait informasi produk dan layanan yang diperlukan
87	PR3	Praktik yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan, termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.
		Aspek: Komunikasi Pemasaran
88	PR4	Program yang berhubungan dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsor.
		Aspek: Privasi Pelanggan
89	PR5	Total jumlah keluhan pelanggan dan kerugian pelanggan dan diperkuat tentang pelanggaran privasi
		Aspek: Kepatuhan
90	PR6	Nilai uang denda yang signifikan yang dibayar karena pelanggaran hukum dan peraturan mengenai penyediaan dan penggunaan produk dan layanan.

Tabel 5: Suplemen Pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia

Indikator: INVESTASI DAN KEUANGAN	
Aktivitas Riba	
1	Identifikasi jenis aktivitas yang mengandung riba
2	% kontribusi dari profit
Aktivitas Gharar	
3	Identifikasi jenis aktivitas yang mengandung gharar
4	%kontribusi dari profit
Aktivitas Zakat	
5	Metoda zakat yang digunakan
6	Sumber zakat yang diperoleh
7	Jumlah zakat yang dikeluarkan
8	Penerima zakat
9	Alasan penon-distribusian zakat
10	Opini Dewan Pengawas Syariah mengenai pengumpulan dan penyaluran zakat
Kebijakan Dalam Mengatasi Pembayaran Oleh Insolvent Clients	
11	Menilai atau mengidentifikasi kebijakan untuk menaggulangi <i>insolvent clients</i>
12	Mengungkapkan besarnya biaya tambahan sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran
	Opini Dewan Pengawas Syariah berkaitan dengan izin mengenai biaya tambahan sebagai konsekuensi keterlambatan
13	<i>insolvent clients</i>
14	Besarnya nilai neraca perusahaan saat ini
15	Identifikasi nilai tambah atas laporan

Sumber: ISR. Indikator penilaian A

Berdasarkan analisis dekomposisi dan konvergensi terhadap indeks ISR dan GRI (121) item maka dapat diperoleh jumlah item CSR sebanyak 90 item dengan 10 indikator. Temuan ini memberikan pijakan bagi penelitian berikutnya dalam mengungkapkan CSR dengan alat ukur yang lebih baik. Hasil penelitian ini dapat digunakan secara umum, tidak hanya pada industri perbankan, namun

juga dapat digunakan pada jenis industri yang lain. Namun demikian keandalan alat ukur ini perlu dibuktikan dengan melakukan analisis terhadap isi laporan keuangan dan laporan CSR yang dihasilkan oleh industri perbankan sehingga dapat ditemukan kesesuaian alat ukur hasil penelitian ini dengan kondisi yang sesungguhnya dilaporkan oleh industri perbankan. Jika alat ukur diatas diterapkan pada

perbankan syariah, penulis merekomendasikan untuk menambah suplemen terkait dengan indikator investasi dan keuangan yang mencakup aktifitas aktifitas riba, gharar, zakat, kebijakan mengatasi keterlambatan pembayaran oleh klien yang gagal bayar. Keseluruhan indikator suplemen ini sebanyak 15 item (tabel 5).

SIMPULAN

Perkembangan bank syariah pada negara-negara Islam di dunia, termasuk di Indonesia mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya implementasi, pelaporan, dan pengungkapan CSR yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka, dibutuhkan suatu standar pengungkapan yang dapat diterima secara umum dengan tetap berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini dirancang untuk mengukur pelaporan dan pengungkapan CSR pada bank syariah di Indonesia dengan melakukan penyesuaian dan konvergensi terhadap indeks GRI (121 item) dan indeks ISR. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran dengan menggunakan indeks GRI (72 item, 78 item, 79 item, dan 121 item) tidak menunjukkan skor pengungkapan yang maksimum. Rata-rata pengungkapannya dibawah 50%. Mengingat tidak optimalnya skor pengungkapan CSR berdasarkan indeks GRI maupun ISR maka dilakukan konvergensi terhadap kedua indeks tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan alternatif pengukuran CSR yang akurat dan dapat diterapkan pada industri perbankan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Pengungkapan CSR pada bank syariah di Indonesia dengan indeks ISR (48.75%) lebih baik dibandingkan dengan indeks GRI (21.54%). (b) Secara garis besar, indikator-indikator CSR cukup mewakili indikator-indikator indeks GRI tahun 2011, namun indeks GRI memiliki rincian lebih detail terutama pada indikator ketenagakerjaan, tatakelola organisasi, tanggung jawab terhadap produk dan jasa. Namun demikian indeks ISR lebih relevan digunakan untuk mengukur CSR terutama untuk indikator kinerja sosial dan kinerja lingkungan. (c) Hasil konvergensi indeks GRI dan CSR menghasilkan indeks

pengungkapan CSR sebanyak 90 item dengan 10 indikator yaitu indikator (1) strategi dan analisa, (2) profil organisasi, (3) parameter laporan, (4) tatakelola organisasi, (5) kinerja ekonomi, (6), kinerja lingkungan, (7) kinerja sosial, (8) ketenagakerjaan, (9) masyarakat dan (10) tanggung jawab terhadap produk. (d) Investasi dan keuangan yang mencakup aktifitas aktifitas riba, gharar, zakat, kebijakan mengatasi keterlambatan pembayaran oleh klien yang gagal bayar dimasukkan sebagai suplemen karena indikator ini sangat spesifik dan seluruh bank syariah mengungkapkannya. Hal ini diasumsikan sebagai pembeda (penciri) indikator yang digunakan pada bank syariah.

Penelitian lanjutan mengenai pengukuran menjadi suatu hal yang penting dilakukan sehingga akan terbentuk suatu indeks yang akurat dan relevan untuk industri perbankan di Indonesia maupun industri-industri lainnya yang selama ini menggunakan indeks GRI. Beberapa hal yang menjadi keterbatasan sekaligus menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah: (a) Jumlah sampel yang terbatas yaitu hanya 5 bank syariah dengan periode pengamatan yang pendek yaitu tahun 2009-2011 sehingga terbatas dalam generalisasi hasil penelitian. Penulis mengharapkan, untuk penelitian selanjutnya jumlah sampel bank dapat diperbanyak dan dibandingkan hasilnya dengan bank konvensional sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian bisa lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya. (b) Subjektivitas penulis dalam pemberian penilaian pengungkapan CSR dan melakukan analisis dekomposisi. Diskusi dan penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk memperbaiki hasil analisis. (c) Setelah dilakukan konvergensi dan disusun indeks pengungkapan CSR yang baru, sebaiknya dilakukan analisis pengungkapan CSRnya sehingga dapat dibandingkan dengan pengungkapan CSR sebelum dilakukan konvergensi. (d) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pijakan bagi penelitian-penelitian berikutnya terkait dengan CSR, sehingga akan dapat ditemukan indeks pengukuran yang akurat dan sesuai dengan implementasi pelaksanaan CSR pada industri bank syariah di Indonesia.

PERSANTUNAN:

*Penelitian ini adalah publikasi dari Penelitian Unggulan Program Studi (PUPS) tahun ke-2 yang didanai oleh LPPM UMS dengan kontrak no 337.5/A.3-III/LPPM/VI/2013

* ucapan terimakasih kepada seluruh tim yang terlibat yaitu Erma Setiawati, Nursiam, Mujiyati, Zulkfihar, Fahri Ali Azhar, Dimas Bangkit A. dan Yusuf Abdullah

DAFTAR REFERENSI

- Almilia, L.S., & Ikka, R. (2007). Analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan pengaruh dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Proceedings Seminar Nasional FE Universitas Trisakti*.
- Anggraini, F.R. (2006). Pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan: Study empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI. *Proceedings SNA IX-Padang*.
- Anshori, A. G. (2009). *Hukum perbankan syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Azhar, F. A., & Trisnawati. (2013). Pengungkapan Islamic social reporting pada bank syariah di Indonesia. *Proceedings, Seminar nasional SANCALL 2013, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS*, ISBN 878-979-636-147-2.
- Baydoun, N., & Willet, R. (1997). Islam and accounting: Ethical issues in the presentation of financial information, accounting, commerce and finance. *The Islamic Perspective*, 1 (1), hal. 1-25.
- Bourin, G., & Savarina, R. (2004). Determinants of the corporate decision to disclose social information. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 2 (1), hal 36-51.
- Burke, M. C., & Rodrigues, L.C. L. (2006). Communication of corporate social responsibility by Portuguese banks: A Legitimacy theory perspective. *Corporate Communication: An International Journal*, 11(3), hal. 232-248.
- Clarkson, A.B., & Dixon, R. (1995). Environmental risk and management strategy: The implications for financial institutions. *The International Journal of Bank Marketing*, 3(2), hal. 22-29.
- Deegan, C. (2002), The legitimising effect of social and environmental disclosure – a theoretical foundation, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 15 No. 3, pp. 282-312.
- Fandinata, H. (2012). *Perbandingan perhitungan bunga pada bank konvensional dengan Bank Syariah*. (28 Oktober 2012). Web site: <http://hiskiafandinata.blogspot.com>.
- Febrina & Suaryana, Agung. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*. UNSYIAH.
- Fitria, S., & Hartanti, D. (2010). Islam dan tanggung jawab sosial: Studi menjabarkan perbandingan pengungkapan pelaporan inisiatif global yang berdasarkan indeks dan pelaporan Islamic sosial indeks. *Simposium Pendidikan Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*. UNSOED.
- Hackson, D., & Milne, M. J. (2006). Some determinant of social and environmental disclosure in New Zealand companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 9 (1), hal. 77-108.
- Haniffa, R. (2002). Social reporting disclosure: An Islamic perspective. *Indonesian Management and Accounting Research* 1 (2), hal.128-146.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2001). A conceptual framework for Islamic accounting: The Shariah paradigm. *International*

- Conference on Accounting, Auditing and Finance*. Palmerstone North, New Zealand, Unpublished article.
- Hasan, A. & Harahap, S.S. (2010). Exploring Corporate Social Responsibility disclosure: case of Islamic banks, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol. 3 No. 3, hal. 203-227
- Hillman, A.J. & Keim, G.D. (2001). Shareholder value, stakeholder management, and social issues: what's the bottom line?, *Strategic Management Journal*, Vol. 22, hal. 125-39.
- Husain G. R., & Rania, K.. (2010). *Social reporting by Islamic Banks: Does social justice matter?*. International Graduate School of Business University of South Australia, School of Accounting and Finance. The University of Dundee United Kingdom, Australia.
- Lanros, P. (2001). Equator principles or how I learned to stop worrying and sustainability. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 27 (1).
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social reporting by Islamic Banks. *ABACUS*, 42 (2), hal. 266-289.
- Mansur, S. (2012). *Pelaporan corporate social responsibility (CSR) perbankan Syariah berdasarkan perspektif Syariah enterprise theory*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Muhammad. (2000). *Sistem dan prosedur operasional bank Syariah* (Cetakan). UII, Yogyakarta.
- Othman, R., Thani, A. Md., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic social reporting among top Shariah-approved companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies* , 12.
- Ousama, A.A & Fatima, A.H. (2006). *The Determinants of Voluntary Disclosure in the annual reports by shariah approved companies listed in bursa Malaysia*. Paper presented at IIUM International Accounting Conference 3 26-28 June 2006, Kuala Lumpur, Malaysia
- Payne, R. W. (2002). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: An Application of Stakeholder Theory. *Accounting, Organisations and Society*, Vol. 17, No. 6, h. 595-612.
- Permatasari, I. (2012). *Analisis karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan corporate social responsibility*. E-library UMS/repository/Skripsi/index
- Rahman, A., & Widayarsi, K. N., (2008). The analysis of company characteristic influence toward CSR disclosure: Empirical evidence of manufacturing companies listed in JSX. *JAAI*, 12 (1), hal 25.
- Sairally, S. (2005). Evaluating the 'social responsibility' of Islamic finance: Learning from the experiences of socially responsible investment funds. *The 6th International Conference on Islamic Economic and Finance*.
- Sembiring, E. R. (2005). Karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial: Studi empiris pada perusahaan yang tercatat di BEJ. *Proceedings SNA VIII*, hal 379-395.
- Sofyani, H., Wahjuni L. S., Ulu, I., & Syam, D. (2012). Islamic social reporting index sebagai model pengukuran kinerja sosial perbankan Syariah: Studi komparasi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 4 (1), hal. 36-46.
- Suharto, E. (2006). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial* (edisi ke-2). Bandung: Refika Aditama.

- Sulaiman, M. (2004). Environmental disclosure in Malaysian annual report: A legitimacy theory perspective. *International Journal of Commerce and Management*, 14(1), hal. 44-48.
- Silber, J., & Weber, M. (2009). Labour market discrimination: Are there significant differences between the various decomposition procedures? *Journal Applied Economics*, 31, hal. 351-369.
- Swa, Majalah. (2010). *Membumikan Bisnis Berkelanjutan; Konsep Dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. www.swa.com.
- Trisnawati, R. (2011). Social responsibility and enviromental disclousure of annual report in banking sector - Indonesian listed companies. *Proceedings, international Conference Committee 2010-2011*. Auditorium UMS.
- Trisnawati, R., Azhar, F. A., & Bangkit A. D. (2012). *Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) pada bank Syariah di Indonesia*. Laporan penelitian kolaborasi dosen-mahasiswa, FE UMS, tidak dipublikasikan.
- Veronica, T. M. (2008). *Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Diakses tanggal 11 Desember 2011, dari www.google.com.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah konsep dan aplikasi CSR (corporate social responsibility)*. (Cetakan kedua). Gresik: Francho Publishing.